



FORUM MASJID DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

**Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
di Klepu Sooko Ponorogo Jawa Timur**

**Pidato Pengukuhan Guru Besar
Dalam Bidang Ilmu Metodologi Pengembangan Masyarakat Islam
Disampaikan di Hadapan Sidang Senat Terbuka
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Kamis, 30 Mei 2024**



Prof. Dr. Azis Muslim, M.Pd.
Dosen Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**FORUM MASJID DAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT:
Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di
Klepu Sooko Ponorogo Jawa Timur**

Pidato Pengukuhan Guru Besar
Dalam Bidang Ilmu Metodologi Pengembangan Masyarakat Islam
Disampaikan di Hadapan Sidang Senat Terbuka
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Kamis, 30 Mei 2024



Oleh:
Prof. Dr. Azis Muslim, M.Pd.
Dosen Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

FORUM MASJID DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT:
Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Klepu Sooko
Ponorogo Jawa Timur

Prof. Dr. Azis Muslim, M.Pd.

vi + 62 hlm.; 14,5 x 20,5 cm

UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
2024

ABSTRAK

Masjid sering kali hanya difungsikan sebagai tempat sholat dan pengajian-pengajian. Padahal, masjid memiliki banyak fungsi sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah. Diantaranya adalah sebagai tempat untuk membangun ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji forum masjid dalam membangun ekonomi masyarakat. Penelitian dilakukan dengan pendekatan etnografi. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Analisis data dilakukan dengan model interaktif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa forum masjid mampu membangun kesejahteraan masyarakat melalui program unggulannya. Keberhasilan itu diraih dengan menerapkan proses pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sistematis dan juga menjalin kerja sama dengan pihak lain. Selain itu, forum masjid ini memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang keagamaan. Hal ini sangat mendukung dalam melakukan proses-proses pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis pada masjid.

Kata Kunci: *Forum Masjid, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat.*

ABSTRACT

Recently, the mosques are often used only as a place of prayer, worship, and recitations. In fact, the mosque has many other functions as exemplified by the Prophet, such as being a place to build the community economy. Therefore, this research aims to examine the mosque forum in building the community economy with an ethnographic approach. The data were collected through interviews and observations, and analyzed using an interactive model. The results showed the mosque forum can build community welfare through its superior program. This success is achieved by implementing a systematic process of empowerment, as well as collaborating with other parties. Furthermore, this forum has competent human resources in the field of community empowerment and religious affairs. This is very supportive in carrying out the processes of economic empowerment.

Keywords: *Mosque Forum, Community Economic Empowerment, Community Welfare.*

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	v

FORUM MASJID DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT: Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Klepu

Sooko Ponorogo Jawa Timur	1
A. Pendahuluan	2
B. Kajian Pustaka	5
C. Metode Penelitian	10
D. Sekilas Tentang Forum Masjid	12
E. Proses Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	15
F. Hasil Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	20
G. Pembahasan Hasil Penelitian	23
H. Kesimpulan	27

MOSQUE FORUM AND COMMUNITY WELFARE:

Analysis of Community Economic Empowerment in

Klepu Village in Indonesia	29
A. Introduction	29
B. Literature Review	31
C. Research Method	35

D. Overview of the Mosque Forum.....	37
E. Community Economic Empowerment Process.....	39
F. Results of Community Economic Empowerment	44
G. Discussion	46
H. Conclusion	49
Ucapan Terima Kasih	50
Daftar Pustaka	51
Biodata	56

**FORUM MASJID DAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT:
Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di
Klepu Sooko Ponorogo Jawa Timur**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yang terhormat, Ketua Senat, Sekretaris Senat, dan Anggota Senat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Yang terhormat, Rektor, Wakil I, II, dan III, beserta seluruh civitas akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Yang terhormat, Bapak-Ibu tamu undangan yang berbahagia.
- Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan ridho dan pertolongannya, pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan yang mulia ini.
- Sholawat dan salam juga saya haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.
- Selanjutnya, ijinkanlah saya menyampaikan pidato pengukuhan guru besar berikut ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

A. Pendahuluan

Masjid merupakan tempat suci dan tempat ibadah bagi umat Islam. Sebagai tempat suci dan tempat ibadah, masjid memiliki banyak fungsi, diantaranya adalah sebagai tempat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, tempat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan politik dan sosial kemasyarakatan, tempat untuk mendidik dan membangun karakter masyarakat, dan tempat untuk membangun perekonomian masyarakat (Asif, dkk, 2021). Fungsi-fungsi itu telah dicontohkan oleh Rasulullah ketika beliau ingin membangun masyarakat yang sejahtera dengan membangun masjid sebagai langkah awalnya (Isnaini, dkk, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa masjid menjadi tempat yang sangat potensial untuk membangun masyarakat yang sejahtera baik jasmani maupun rohani (Sofii & Pertiwi, 2021). Karena itu, pengelola masjid harus menyadari bahwa masjid sebagai pusat peradaban memiliki peran yang sangat signifikan dalam peningkatan spiritualitas masyarakat, pengembangan kegiatan-kegiatan sosial, pengembangan kemampuan intelektual masyarakat, pembangunan ruang-ruang diskusi untuk mencari solusi permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan peningkatan ekonomi masyarakat. Semua itu adalah kegiatan suci dan bernilai ibadah.

Pada prakteknya, masjid yang menjalankan peran sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah masih sangat sedikit (Omar, dkk, 2019). Sebagian besar pengelola masjid masih memfungsikan masjid sebagai tempat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan-nya (ibadah mahdhoh) dan tempat

untuk pengembangan intelektual masyarakat dalam bentuk pengajian-pengajian. Sementara, pemanfaatan masjid sebagai tempat untuk menyelesaikan persoalan sosial kemasyarakatan dan politik masih belum kelihatan, apalagi pemanfaatan masjid sebagai tempat untuk pengembangan atau peningkatan ekonomi masyarakat (Hady, 2010). Masjid yang memainkan peran sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah masih seperti sebuah salju di atas gunung yang tidak tampak jika tidak ditelusuri dengan jeli. Karena itu menjadi menarik mengkaji hubungan antara masjid dengan kesejahteraan masyarakat terutama di daerah-daerah yang penduduknya tergolong miskin. Asumsinya adalah hampir setiap desa yang ada di Indonesia atau dusun yang lebih kecil wilayah administrasinya memiliki masjid. Jika setiap masjid menjalankan fungsi dan perannya sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah, tentu permasalahan kemiskinan di negeri ini dapat terselesaikan.

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis kehadiran forum masjid yang ada di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Desa Klepu adalah salah satu desa miskin yang ada di kabupaten Ponorogo. Karena kemiskinan, banyak orang yang berpindah-pindah agama hanya gara-gara diberi bantuan ekonomi oleh pemeluk agama lain (Halwan, 2019). Penelitian ini difokuskan pada proses dan hasil pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh forum masjid terutama dalam membendung kasus konversi agama.

Penelitian ini menarik karena sepanjang pengamatan peneliti dalam penelusuran literatur belum banyak kajian mengenai hal tersebut. Beberapa penelitian yang fokus kajiannya mendekati kajian ini, diantaranya, adalah optimalisasi pemberdayaan masyarakat berbasis masjid (Ridwanullah dan Herdiana, 2018). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Masjid At-Taqwa di Cirebon telah menjalankan fungsi dan perannya dalam pemberdayaan masyarakat di bidang spiritual keagamaan, pendidikan, ekonomi, sosial kemasyarakatan, dan pengembangan seni budaya. Fahmi (2018) mengkaji tentang upaya meningkatkan peran masjid dalam pemberdayaan ekonomi. Dalam penelitian ini, Fahmi menjelaskan bahwa masjid membangun koperasi dan memberikan pinjaman modal kepada pengusaha-pengusaha kecil sebagai strategi untuk pemberdayaan masyarakat. Khairunnisa dan Siregar (2022) mengkaji tentang peran masjid dalam pengembangan UMKM. Temuan penelitian ini menyatakan bahwa masjid menyediakan fasilitas tempat usaha di sekitar masjid untuk para pelaku UMKM tanpa dipungut biaya sewa. Kajian-kajian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu baru sebatas pada peran masjid dalam menyediakan fasilitas, baik modal maupun lokasi usaha, kepada pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Peran pemberdayaan yang sesungguhnya yang meliputi penyadaran, peningkatan ketrampilan, dan pemberian daya kepada masyarakat agar mampu menciptakan lapangan kerja belum disentuh. Selain itu, kajiannya juga masih berfokus pada satu masjid yang dikelola oleh pengurus yang dibentuknya sendiri.

Sementara, kajian mengenai gabungan masjid terutama masjid-masjid yang berbeda aliran atau pemikiran dengan pengelolaan bersama melalui sebuah forum dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat belum ditemukan. Karena itu, menurut hemat penulis penelitian ini masih layak.

B. Kajian Pustaka

Penelitian tentang masjid sebagai objek kajian sudah banyak dilakukan, terutama yang berkaitan dengan kesejarahan dan arsitekturnya. Tetapi, penelitian tentang masjid sebagai subjek kajian terutama dalam kaitannya dengan penyelesaian masalah sosial, politik, dan lebih-lebih masalah ekonomi masyarakat masih sangat terbatas. Di sini, masjid sebagai objek kajian dipahami dengan masjid sebagai sebuah bangunan, sedangkan masjid sebagai subjek kajian dipahami dengan orang-orang yang mengelola masjid. Kajian-kajian tentang masjid sebagai subjek dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat diantaranya ditulis oleh Khairunnisa & Siregar (2022) dan Rusanti, dkk (2021). Khairunnisa & Siregar (2022) mengungkapkan bahwa masjid Raya Al-Falaah yang dijadikan lokus penelitiannya menyediakan fasilitas outlet, air, dan listrik untuk para pelaku UMKM dengan pembagian hasil 60% untuk pelaku usaha dan 40% disumbangkan ke masjid. Sementara, Rusanti, dkk (2021) menjelaskan bahwa masjid yang dijadikan objek penelitiannya menyediakan tempat usaha bagi pelaku UMKM. Pertama, tempat usaha yang disediakan di lantai dasar masjid. Di tempat ini pelaku UMKM tidak dipungut uang sewa

dan dapat menjajakan dagangannya setiap hari jum'at dari jam 09.00 – 15.00. Kedua, tempat usaha yang disediakan di halaman masjid atau tempat parkir. Di tempat ini pelaku UMKM dipungut uang sewa yang besarnya antara Rp. 500.000 - Rp. 700.000 per tahun dan dapat membuka usahanya setiap hari. Dua kajian ini memotret masjid dalam melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyediaan tempat usaha untuk para pelaku UMKM.

Soemitra (2014), Susanto (2020), dan Sofii & Pertiwi (2021) mengkaji dari sisi lain, yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan penyediaan modal usaha. Soemitra (2014) menceritakan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat di masjid Al-Jihad dilakukan dengan membangun *Bait al-Maal wa at-Tamwil* (BMT) untuk membantu dan memudahkan pelaku UMKM dalam mengakses modal usaha. Pendirian BMT ini dipandang penting, karena banyak pelaku UMKM di sekitar masjid Al-Jihad yang terjerat hutang pada rentenir. Dana pengelolaan BMT berasal dari iuran pokok dan iuran wajib peserta serta pengumpulan zakat, infak, dan shodaqoh. Sedikit berbeda dengan Soemitra, Susanto (2020) menjelaskan bahwa Masjid Sabilillah memberdayakan ekonomi masyarakat dengan mendirikan koperasi dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Koperasi dipergunakan untuk membantu pelaku UMKM dengan sistem simpan pinjam, sedangkan LAZ digunakan untuk membantu membangun dan mengembangkan usaha orang lemah (miskin) dengan sistem hibah. Sementara Sofii & Pertiwi (2021) menjelaskan bahwa Masjid Jami' As-Sakinah memberdayakan ekonomi masyarakat dengan memberi pinjaman

modal kepada pelaku UMKM yang pendanaannya dikumpulkan dari zakat, infak, dan shodaqoh. Sayangnya, pinjaman modal usaha yang diberikan oleh masjid-masjid tersebut tidak dibarengi dengan pendampingan dalam mengelola usahanya, sehingga tidak sedikit pelaku UMKM yang mengalami gagal usaha dan berdampak pada kredit macet.

Di sisi lain, Muslim, dkk (2014) mengkaji pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kerja sama kemitraan dengan pihak lain. Muslim, dkk (2014) menjelaskan bahwa masjid Jogokaryan melakukan kerja sama dengan BMT Bina Ikhsanul Fikri untuk memudahkan jamaah dalam mengakses modal usaha. Kerja sama dengan lembaga keuangan dipandang penting karena banyak orang miskin yang tidak dapat mengakses modal akibat tidak memiliki agunan (jaminan piutang). Di sini, masjid berperan sebagai penjamin bagi jamaah yang hendak meminjam uang kepada lembaga keuangan tersebut. Oleh sebab itu, masjid selalu memonitor nasabah terus menerus. Kajian yang sama dilakukan oleh Said & Mahmuddin (2015). Dalam studinya yang dilakukan di Palangka Raya Kalimantan Tengah, Said & Mahmuddin menjelaskan bahwa masjid-masjid dalam membangun ekonomi masyarakat berkerja sama dengan Bank Muamalah Indonesia. Sistemnya adalah Bank Muamalah Indonesia melakukan kerja sama dengan BMT. Karena itu, masjid-masjid yang hendak melakukan kerja sama dengan Bank Muamalah Indonesia harus memiliki BMT. Melalui BMT ini pinjaman uang dikucurkan oleh Bank Muamalah Indonesia. Kemudian BMT meminjamkan uang yang dikucurkan tersebut

kepada jamaah masjid. Jadi status jamaah adalah pinjam modal kepada BMT dan BMT pinjam modal kepada Bank Muamalah Indonesia.

Berdasarkan peta kajian di atas, penelitian tentang forum masjid dan kesejahteraan masyarakat ini masih layak untuk dilanjutkan. Karena penelitian ini mengkaji tentang prosesnya, yaitu proses pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh forum masjid. Proses pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah langkah-langkah yang ditempuh agar pemberdayaan berjalan secara efektif dan efisien, serta membuahkan hasil yang maksimal (Muslim, dkk, 2014). Menurut Wrihatnolo & Dwidjowijoto (2007) proses pemberdayaan ekonomi masyarakat itu meliputi tiga tahapan, yaitu membangun kesadaran, membangun capacity building, dan pemberian daya. Membangun kesadaran masyarakat adalah proses awal yang harus dituntaskan sebelum proses yang lain dilakukan. Tahapan ini merupakan tahapan penentu apakah proses pemberdayaan selanjutnya dapat dilakukan atau bahkan dihentikan. Tanpa adanya kesadaran dari penerima manfaat, program pemberdayaan tentu tidak akan berhasil (Muslim, dkk, 2014).

Langkah berikutnya adalah membangun capacity building. Pada tahapan ini penerima manfaat program diberi pelatihan-pelatihan ketrampilan usaha untuk membangun usaha barunya atau mengembangkan usaha yang telah ada agar memiliki daya saing dengan pengusaha-pengusaha lainnya. Pelatihan ketrampilan yang diberikan dapat berupa kursus, kunjungan lapangan ke tempat-tempat usaha yang telah sukses, dan

lain sebagainya. Tujuan dari membangun capacity building adalah membekali ketrampilan kepada penerima manfaat agar mampu mengelola usahanya secara mandiri dan berkelanjutan (Theresia, 2015).

Langkah terakhir adalah pemberian daya. Setelah siap segalanya, yaitu penerima manfaat telah memiliki ketrampilan usaha dan siap membuka usaha, maka perlu diberikan daya atau kekuatan kepada penerima manfaat. Daya dapat berupa modal usaha dan dapat berupa kepercayaan. Pemberian modal usaha baik berupa hibah maupun pinjaman untuk membangun sebuah usaha baru atau untuk pengembangan usaha yang telah ada merupakan bentuk pemberian daya atau penguatan. Sebab, membuka usaha atau mengembangkan usaha tidak cukup dengan ketrampilan saja, tetapi diperlukan modal usaha. Lebih-lebih pemberian kepercayaan kepada mereka yang akan membuka atau mengembangkan usaha, sehingga mereka dapat menjalankan usahanya secara mandiri. Hal ini penting karena pemberdayaan masyarakat tidak boleh menciptakan ketergantungan baru (Ife, 2016).

Prinsip utama dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat agar tidak menciptakan ketergantungan adalah bekerja bersama masyarakat, bukan bekerja untuk masyarakat (Nyerere, 1978). Prinsip ini mengandung makna bahwa pelaku pemberdayaan masyarakat (forum masjid) harus bekerja bersama sama masyarakat dalam segala hal, mulai dari menggali permasalahan sampai menikmati hasil pemberdayaan. Dengan kata lain, forum masjid tidak diperkenankan merancang program sendiri tanpa

melibatkan masyarakat. Selain itu, agar tidak menciptakan ketergantungan, forum masjid harus mampu membangun iklim dan suasana yang memungkinkan bagi penerima manfaat untuk berkembang. Misalnya, program-program inovatif yang dikembangkan harus didukung dengan ketersediaan sumber daya lokal yang ada di wilayah penerima manfaat.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan etnografi. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Desa Klepu Sooko Ponorogo Jawa Timur Indonesia. Alasannya adalah pertama, desa ini merupakan desa miskin yang tanahnya kurang subur, sehingga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan kreativitas dengan melakukan pemberdayaan-pemberdayaan di bidang ekonomi. Kedua, masyarakat yang mendiami desa ini sering berpindah agama mengikuti agama yang dipeluk oleh pemberi bantuan karena tuntutan ekonomi. Ketiga, forum masjid yang menjadi fasilitator dalam pemberdayaan ekonomi ini memiliki aliran atau kepercayaan yang beragam.

Informan utama penelitian ini adalah orang-orang yang masuk dalam organisasi forum masjid, masyarakat setempat, dan pejabat pemerintah desa. Informan pendukungnya adalah para pengurus keagamaan di luar forum masjid di desa dan kecamatan setempat. Pemilihan informan sebagai sampel penelitian dilakukan dengan tehnik kreteria. Adapun kreteria untuk informan utama adalah inisiator pembentukan forum masjid, orang-orang yang aktif dalam pemberdayaan ekonomi

masyarakat di forum masjid, dan pejabat pemerintah yang menaungi kegiatan pemberdayaan ekonomi di forum masjid. Sementara, kriteria untuk informan pendukungnya adalah orang-orang dari lembaga keagamaan di luar forum masjid yang terlibat aktif dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di forum masjid.

Besarnya sampel untuk informan utama dan pendukung ditetapkan berdasarkan kejenuhan informasi yang diperoleh. Artinya, penarikan sampel untuk informan utama dan pendukung akan diakhiri, jika informasi baru yang diharapkan muncul dari informan baru tidak lagi didapatkan. Dengan kata lain, jika sudah tidak ada informasi baru yang diperoleh dari informan baru, maka penarikan sampel untuk informan utama dan pendukung dapat diakhiri. Berdasarkan kriteria ini diperoleh jumlah sampel 21 orang yang terdiri dari 16 informan utama dan 5 orang informan pendukung.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi. Data hasil wawancara dan observasi dicatat, direkam, dan divalidasi. Validitas data dilakukan dengan triangulasi, yaitu peneliti melakukan pengecekan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan hasil wawancara yang lain, dan membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi. Selanjutnya, data yang sudah valid dianalisis. Analisis data dilakukan dengan teknik interaktif dari Miles & Huberman (1984). Langkahnya dimulai dengan reduksi data. Reduksi data dilakukan dalam dua tahap, yaitu saat berada di lapangan dengan menggunakan triangulasi sebagaimana

dijelaskan di atas, dan saat berada di rumah dengan cara memilah dan memilih data yang perlu untuk dianalisis lebih jauh. Data yang telah terpilah dan terpilih disajikan dan dicari hubungan atau keterkaitannya dengan permasalahan yang hendak dipecahkan. Data yang telah ditemukan keterkaitan dengan permasalahan pokok ditarik kesimpulannya dengan cara membandingkan dengan hasil-hasil penelitian terdahulu atau penelitian sebelumnya yang relevan.

D. Sekilas Tentang Forum Masjid

Forum masjid di desa Klepu Sooko Ponorogo berdiri pada tahun 2008. Pada awal berdirinya, forum ini beranggotakan 17 masjid yang semuanya berada di wilayah desa Klepu. Seiring berjalannya waktu, keanggotaanya bertambah satu karena adanya pembangunan masjid baru di desa tersebut. Berdirinya forum ini bermula dari peristiwa yang dilakukan oleh Munawar yang mencoba melakukan tindakan puritanitas (pemurnian agama) pada masyarakat muslim di desa Klepu dalam kaitannya dengan ibadah-ibadah. Munawar memandang bahwa tindakan-tindakan ibadah yang dilakukan oleh umat Islam sudah menyimpang dari ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kepercayaan umat Islam di Klepu sudah bercampur dengan budaya lokal, sehingga mereka banyak terlibat dalam tindakan-tindakan *bid'ah*, *kurafat*, dan *takhayul*. Munawar adalah seorang muslim yang berafiliasi pada organisasi keagamaan Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) (Lutfi, 2019). Organisasi ini merupakan salah satu dari

organisasi keagamaan Islam yang ada di desa Klepu. Selain DDII, organisasi keagamaan Islam lainnya yang ada di desa Klepu adalah Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Jamaah Tabligh (JT). Tindakan yang dilakukan oleh Munawar ini sangat melukai umat Islam lainnya, terutama orang-orang yang berafiliasi pada organisasi NU. Lebih-lebih, pengikut NU merupakan pengikut mayoritas di desa ini (Wawancara dengan informan 02, 03 dan 04).

Selain itu, Munawar juga sering menyuarakan isu kristenisasi pada orang-orang gereja yang menyalurkan bantuan kepada masyarakat miskin. Munawar memandang bahwa bantuan yang diberikan oleh gereja kepada masyarakat miskin sangat mengancam keberadaan umat Islam secara kuantitas. Karena itu, menurutnya tindakan-tindakan ini harus dibendung. Tindakan yang dilakukan oleh Munawar ini memunculkan reaksi dari kalangan gereja yang secara jumlah pengikutnya lebih besar dari pengikut agama Islam. Hal ini jika dibiarkan terus menerus bukan tidak mungkin akan terjadi gesekan antara orang-orang Muslim dengan Nasrani di desa Klepu. Karena gereja memandang bahwa penyaluran bantuan kepada masyarakat miskin merupakan program rutin dari gereja untuk menyalurkan “kasih” antar sesama, bukan program kristenisasi seperti yang dituduhkan oleh Munawar (Wawancara dengan informan 20 dan 02).

Tindakan Munawar ini akhirnya menjadi kemelut baik di tubuh umat Islam sendiri maupun Nasrani. NU sebagai organisasi Islam tertua di desa Klepu merasa dihina oleh pendatang baru

yang mem-*bid'ah-bid'ah*-kan kegiatan ibadahnya (Wawancara dengan informan 02 dan 03). Di sisi lain, gereja yang orang-orangnya banyak menduduki jabatan strategis di pemerintahan desa merasa kurang nyaman karena ruang gerak ibadahnya dianggap mengancam keberadaan agama lain (Wawancara dengan informan 20 dan 21). Ketika kemelut ini semakin memanas, muncullah Mustakim seorang muslim dari kalangan Muhammadiyah mengajak duduk bersama para takmir masjid yang ada di desa Klepu untuk memecahkan permasalahan bersama dengan hati dan kepala yang dingin (Wawancara dengan informan 02 dan 03). Para tokoh DDII menyambut baik ajakan Mustakim, karena mereka pada dasarnya tidak sepakat dengan tindakan Munawar (Wawancara dengan informan 03 dan 08). Demikian juga dari kalangan NU dan JT (Wawancara dengan informan 09 dan 10). Lalu dibentuklah forum masjid atau takmir masjid di tingkat desa. Forum ini dijadikan sebagai wadah komunikasi yang resmi antar masjid dan atau gereja di desa Klepu.

Ada beberapa hal penting yang menjadi kesepakatan dalam forum masjid ini. Diantaranya adalah pertama, forum ini didirikan atas kepentingan bersama dan berdiri di atas semua golongan. Karena itu, forum ini tidak boleh membicarakan atau memaksakan kebenaran aliran yang ada, seperti DDII, Muhammadiyah, NU, dan JT. Dengan kata lain, masalah perbedaan yang diakui kebenarannya oleh masing-masing golongan tidak boleh dibicarakan dalam forum ini. Kedua, saling menghargai dan menjaga toleransi baik dengan sesama

umat Islam maupun dengan umat lainnya. Ketiga, menghindari penyaluran bantuan kepada pemeluk agama lain untuk mencegah isu misionaris. Keempat, membangun ekonomi jamaah agar tidak mudah digoyahkan agamanya (Wawancara dengan informan 02, 03, 04, 08, 09 dan 10).

E. Proses Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh forum masjid melalui tiga program, yaitu pemberian bantuan kambing, santunan untuk orang-orang lemah, dan membangun wirausaha (Wawancara dengan informan 02, 04 dan 07). Bantuan kambing diberikan kepada keluarga miskin yang beragama Islam. Artinya, jika ada orang miskin di desa Klepu yang agamanya bukan Islam, dia tidak akan diberi bantuan ini. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya dugaan misionaris (Wawancara dengan informan 04). Pemilihan orang yang berhak menerima bantuan dilakukan oleh pengurus masing-masing masjid yang menjadi anggota forum, bukan oleh forum. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari salah sasaran dan juga untuk memudahkan pengawasan dan evaluasi (Wawancara dengan informan 05). Program ini dipilih oleh forum masjid, karena secara geografis desa Klepu yang berada di lereng pegunungan cocok untuk ternak hewan, terutama kambing. Melimpahnya rumput yang ada di sekitar tempat tinggal dan petani sebagai mata pencaharian utama menjadikan pemilihan program ini tepat (Observasi pada 5 Maret 2022). Pemilihan program ini selaras dengan teori pemberdayaan yang menyatakan bahwa

pemberdayaan masyarakat harus memperhatikan potensi yang dimiliki oleh masyarakat sasaran (Soedarto, dkk, 2016).

Dana untuk pemberian bantuan kambing diperoleh dari iuran setiap masjid yang menjadi anggota forum. Besarnya iuran ditentukan sebesar Rp. 200.000,- setiap bulannya. Pengumpulan dana dilakukan pada saat rapat dan sekaligus pengajian rutin yang tempatnya ditetapkan secara bergiliran. Dana yang telah terkumpul dalam satu tahun, kemudian dibelikan kambing. Jumlah dana yang terkumpul dalam satu tahun sebesar Rp. 40.800.000,- dengan rincian besaran iuran dikalikan dengan jumlah masjid dan jumlah bulan. Dana sebesar itu dapat digunakan untuk membeli kambing sebanyak 16 ekor dengan harga rata-rata per kambing Rp. 2.500.000,-. Sistem penyaluran bantuan ditawarkan kepada masing-masing masjid yang siap menerima. Kemudian masjid itu menyalurkan kepada jamaahnya yang kurang mampu dari sisi ekonomi. Setiap jamaah yang kurang mampu akan menerima sepasang kambing. Karena itu, jumlah penerima manfaat dari program ini ada 8 keluarga setiap tahunnya (Wawancara dengan informan 04).

Sistem pengawasan terhadap penerima manfaat agar bantuan benar-benar digunakan sesuai tujuannya dilakukan oleh masing-masing masjid yang menjadi anggota forum. Hal ini untuk mempermudah dalam memantau perkembangan dan keberhasilan. Sementara evaluasi secara menyeluruh dilakukan oleh forum masjid. Sistem evaluasi dilakukan dengan cara masing-masing masjid melaporkan kondisi, perkembangan, dan keberhasilan bantuan yang telah disalurkan sebelum melakukan

penyaluran bantuan berikutnya (Wawancara dengan informan 04 dan 05). Melalui sistem pengawasan dan evaluasi yang ketat, program ini berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan terus berjalannya program hingga tahun 2019. Tahun 2020 hingga awal tahun 2022 program ini berhenti karena masjid-masjid ditutup akibat dampak pandemi Covid-19. Dengan ditutupnya masjid, tentu masjid tidak ada masukan, sehingga masjid tidak mampu membayar iuran bulanan (Wawancara dengan informan 02, 04, dan 05).

Selain bantuan kambing, program forum masjid lainnya adalah santunan untuk orang-orang lemah. Orang-orang lemah menurut kategori forum masjid ini adalah orang-orang jompo yang miskin, janda-janda miskin, dan anak yatim dan atau piatu (Wawancara dengan informan 02 dan 04). Mereka ini diberi santunan yang dananya diperoleh melalui infak dan shodaqoh dari peserta rapat yang hadir dalam pertemuan rutin forum masjid. Pada saat diadakan rapat bulanan, setiap masjid yang menjadi anggota forum wajib mengutus perwakilan minimal dua orang. Mereka yang hadir ditawari infak atau shodaqoh untuk membantu meringankan kebutuhan orang-orang lemah dengan disodori kotak infak atau shodaqoh yang digilirkan oleh sesama peserta rapat (Wawancara dengan informan 04). Dana yang terkumpul tidak langsung disalurkan kepada yang berhak menerima, tetapi menunggu jumlahnya layak untuk dibagikan. Selain penggalan dana dari dalam, forum masjid juga membuka ruang kepada pihak luar untuk berpartisipasi dalam program ini. Pihak luar yang mendukung dan rutin memberikan

bantuan untuk program ini adalah Pondok Pesantren Gontor Darussalam. Pondok pesantren ini memiliki santri ribuan orang. Hampir setiap bulan pondok pesantren ini mengirimkan bantuan antara 1-3 kwintal beras kepada forum masjid untuk dibagikan kepada orang yang berhak menerima (Wawancara dengan informan 02, 04, dan 17).

Langkah forum masjid dalam melakukan pendistribusian bantuan ini sama dengan langkah yang dilakukan pada pendistribusian bantuan kambing. Semua uang yang terkumpul diwujudkan atau dibelanjakan dalam bentuk barang kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, dan gula. Setiap penerima akan mendapatkan bantuan kira-kira seharga Rp. 150.000,-. Setelah barang yang akan dibagikan diketahui jumlahnya untuk penerima, forum masjid menawarkan kepada masing-masing masjid untuk mendistribusikan (Wawancara dengan informan 04, 06, dan 15). Jika terjadi masalah atau konflik yang tidak bisa diselesaikan dalam pendistribusian bantuan atau permasalahan lainnya, maka forum masjid sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Sukarsi sebagai penasehat forum. Keputusan Sukarsi adalah keputusan final, dan semuanya harus menyetujui dengan keputusan itu (Wawancara dengan informan 06, 07, dan 01).

Program pemberdayaan ekonomi yang ketiga adalah membangun kewirausahaan bagi ibu-ibu. Jenis usaha yang dikembangkan berupa makanan olahan dan kerajinan tangan. Kegiatan ini dikordinir oleh ketua Khoirun Nisa. Khoirun Nisa adalah lembaga pendidikan non formal yang dibentuk forum

masjid dengan tujuan meningkatkan kualitas pengetahuan ibu-ibu di desa Klepu (Wawancara dengan informan 07). Proses pemberdayaannya dimulai dengan mengidentifikasi potensi minat dan ketrampilan yang dimiliki oleh ibu-ibu yang menjadi anggotanya. Potensi minat dan ketrampilan yang diidentifikasi terbatas pada dua (2) jenis usaha yang dikembangkan, yaitu makanan olahan dan kerajinan tangan. Proses berikutnya, ketua Khoirun Nisa mencari tenaga ahli yang terampil sesuai kebutuhan yang diinginkan untuk melatih ibu-ibu tersebut. Setelah proses pelatihan selesai, ibu-ibu diberi kesempatan untuk mengaplikasikan hasil pelatihannya. Produk yang dihasilkan bagi yang belum mempunyai pasar sendiri dipasarkan oleh pengurus Khoirun Nisa (Wawancara dengan informan 07, 12, dan 14).

Sistem pemasaran yang dijalankan oleh pengurus Khoirun Nisa melalui kerja sama dengan mini market Coni, sebuah mini market yang dikelola oleh Pondok Pesantren Gontor Darussalam. Prosesnya, pengurus Khoirun Nisa membeli produk yang dibuat oleh anggotanya secara kontan (cash) dengan perjanjian barang yang tidak terjual akan dikembalikan kepada pemiliknya. Artinya, pengurus Khoirun Nisa membeli setiap produk yang dibuat oleh anggotanya secara kontan, lalu diberi merek kemasan dengan Merek Khoirun Nisa. Setelah itu dikirim dan dipasarkan ke mini market Coni. Jika dalam batas waktu tertentu barang tersebut tidak laku terjual dan kadaluarsa, maka barang itu diambil dan dikembalikan kepada pemiliknya untuk diganti barang yang baru (Wawancara dengan informan

07, 12, 13, 14 dan 18).

Dana untuk peningkatan ketrampilan dan modal untuk membeli produk dari ibu-ibu diperoleh Khoirun Nisa melalui dana hibah kementerian agama setempat. Khoirun Nisa mengajukan permohonan dana untuk pemberdayaan ekonomi bagi ibu-ibu di desa Klepu. Kementerian agama menyetujui dan memberikan bantuan sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) (Wawancara dengan informan 07 dan 19). Bantuan ini dijalankan dengan baik dan berjalan lancar. Ibu-ibu banyak yang merasa diuntungkan dengan program ini. Mereka merasakan bahwa produknya terutama makanan olahan lebih banyak yang terjual dari pada yang kembali. Menurut perkiraan mereka, hal ini disebabkan produknya cocok untuk makanan camilan para santri dan harganya juga tidak mahal (Wawancara dengan informan 12, 13 dan 14). Namun sejak akhir tahun 2019, program ini tidak berjalan lancar karena dampak Covid-19. Adanya lockdown dan pembatasan interaksi dengan dunia luar menyebabkan pengurus Khoirun Nisa tidak bisa mengirimkan produknya ke mini market Coni. Di sisi lain, transaksi jual beli di mini market Coni juga sepi (Wawancara dengan informan 07 dan 18).

F. Hasil Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh forum masjid dirasakan manfaatnya oleh umat Islam di desa Klepu. Pasalnya, mereka merasa terbantu dengan pemberian kambing dan pendampingan wirausaha. Hal ini seperti diungkapkan oleh informan 11 berikut:

Saya menerima bantuan kambing jantan dan betina pada tahun 2012 dari forum masjid. Kambing itu sudah beranak berkali kali. Kambing ini dan empat yang masih ada di kandang itu keturunannya saja. Hanya lima ekor yang saya miliki sekarang. Karena induknya yang sudah tua saya jual untuk mencukupi kebutuhan sekolah anak dan kebutuhan dapur. Selain itu, kalau banyak juga repot mencarikan makan. Dengan hadirnya forum masjid di desa sini, saya merasa terbantu. Apalagi sekarang forum itu melakukan pendampingan usaha untuk ibu-ibu. Istriku ikut kegiatan itu sejak tahun 2015. Hasil usahanya lumayan sebelum ada wabah Covid-19, dapat menambah untuk menutup kebutuhan dapur.Bisa bapak lihat sendiri, orang seperti saya yang bekerja sebagai buruh, bagaimana kalau hanya mengandalkan pendapatan dari hasil panen ladang atau sawah dengan kondisi lahan seperti ini? Untuk kebutuhan dapur saja tentu belum cukup, apalagi untuk kebutuhan sekolah anak (Wawancara dan Observasi terhadap informan 11).

Pernyataan informan 11 di atas menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh forum masjid mampu mengatasi masalah kebutuhan dasar masyarakat, terutama kebutuhan pangan dan pendidikan. Selain itu, pemberdayaan ekonomi ini juga mampu membendung permasalahan konversi agama yang sering dilakukan oleh masyarakat karena desakan kebutuhan ekonomi dan bahkan mampu merangsang orang-orang yang telah pindah agama untuk kembali ke agama semula. Hal ini seperti diungkapkan oleh informan 16 berikut:

Saya pernah minta bantuan kambing, tapi ditolak karena saya dikatakan bukan muslim. Ya, saya pernah pindah agama. Saya terpaksa pindah agama, mengikuti orang yang membantu

mencukupi kebutuhan hidup.Karena saya sangat berharap dapat bantuan kambing. Lalu saya kembali menjadi seorang muslim. Tapi, setelah saya kembali masuk Islam, bantuan yang saya harapkan juga tidak langsung diberikan. Nunggunya cukup lama, saya diminta sabar untuk menunggu. Katanya supaya tidak ada masalah dengan yang lain. Saya tidak mengerti, apa maksudnya masalah dengan yang lain.

Pernyataan informan 16 ini dibenarkan oleh informan 03 selaku anggota forum masjid seperti dinyatakan berikut ini:

Di sini, karena tuntutan kebutuhan hidup, gonta ganti agama itu bukan masalah baru. Itu sering terjadi. Karena itu, tugas forum masjid membendung supaya hal itu tidak terjadi. Caranya, jamaah harus dikuatkan baik secara ekonomi maupun akidah. Selain itu, dibuat kesepakatan antar agama untuk tidak memberikan bantuan atas nama agama kepada masyarakat.Nah, alasan tidak memberikan bantuan kambing kepada muallaf, yang bapak tanyakan, karena menjaga kesepakatan ini.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan informan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh forum masjid mampu membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan tercapainya kesejahteraan secara ekonomi dapat berdampak pada ketenangan terutama ketenangan masyarakat dalam memeluk agama, sehingga kasus konversi agama dapat diminimalisir. Ungkapan bahwa kemiskinan itu dekat dengan kekufuran (Al-Ishfahâni, 1982: 53) atau kemiskinan itu dapat membawa seseorang menjadi lemah iman memang benar dengan berkaca pada kasus di Klepu ini. Karena itu, pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin perlu terus dilakukan

terutama oleh tokoh-tokoh agama untuk melindungi dan menjaga akidah pengikutnya.

G. Pembahasan Hasil Penelitian

Keberhasilan forum masjid dalam membangun kesejahteraan masyarakat di desa Klepu tidak terlepas dari munculnya kesadaran para tokoh agama untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Permasalahan itu adalah isu misionaris dan puritanitas agama. Keduanya adalah isu vital yang jika tidak segera ditangani bukan tidak mungkin akan menjadi malapetaka di Desa Klepu. Misionaris dan puritanitas merupakan persoalan agama, namun keduanya tidak dapat dilepas dengan isu kemiskinan. Para misionaris sering melakukan kegiatannya di wilayah-wilayah yang tingkat kemiskinannya tinggi seperti di desa Klepu. Dengan iming-iming harta, para misionaris baik muslim maupun nasrani membujuk orang yang berbeda agama untuk masuk dan mengikuti agamanya (Latief, 2012). Kegiatan seperti ini, jika tidak disadari bersama bisa berdampak fatal dan merugikan semua pihak. Karena itu, upaya yang dilakukan forum masjid untuk memperkuat pertahanan agama yang dianut masing-masing orang melalui jalinan kesepakatan-kesepakatan yang dibangun antar agama maupun inter agama dan melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan upaya yang mulia dan bermartabat.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh forum masjid di desa Klepu sejalan dengan teori pemberdayaan.

Menurut Wrihatnolo & Dwidjowijoto (2007) pemberdayaan masyarakat itu dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu tahap membangun kesadaran, capacity building, dan pemberian daya. Tahapan dari masing-masing proses dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh forum masjid di desa Klepu tampak jelas. Misalnya, tahapan membangun kesadaran. Pada tahap ini, forum masjid yang anggotanya terdiri dari perwakilan masing-masing masjid yang ada di desa Klepu mendiskusikan potensi yang dimiliki dan yang cocok untuk dikembangkan. Pemilihan program budidaya kambing sebagai program utama karena mereka menilai dan sepakat bahwa potensi itu sangat mungkin untuk dikembangkan. Pasalnya, sebagian besar warga berprofesi sebagai petani dengan wilayah lereng pegunungan yang banyak ditumbuhi rumput. Demikian juga dengan penetapan program kewirausahaan bagi ibu-ibu yang hanya memilih jenis usaha olahan makanan dan kerajinan tangan karena potensi untuk memasarkannya telah tersedia, yaitu mini market Coni. Dengan menjelaskan potensi yang dimiliki tentu akan mempermudah bagi forum masjid dalam membangun kesadaran kepada para penerima manfaat. Selanjutnya, tahap capacity building dilakukan dengan mendatangkan orang yang ahli dibidangnya untuk melatih orang-orang yang membutuhkan ketrampilan. Hal ini terlihat jelas pada pemberdayaan di bidang kewirausahaan. Sementara pada program budidaya kambing tidak tampak, karena penerima program adalah petani yang asumsinya mereka telah memiliki ketrampilan untuk melakukan budidaya hewan. Terakhir, tahap

pendayaan atau pemberian daya dilakukan dengan pemberian kambing secara gratis dan membantu pemasaran produk usaha. Rاپinya tahapan-tahapan yang dilalui dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat ini menunjukkan bahwa forum masjid menjalankan kegiatannya secara profesional.

Profesionalitas dalam menjalankan kegiatan ini disebabkan forum masjid memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Ketua lembaga Khoirun Nisa misalnya, dia seorang penyuluh agama fungsional yang bekerja di bawah kementerian agama Kabupaten Ponorogo. Dia memiliki banyak prestasi di bidang pemberdayaan masyarakat. Sementara, ketua forum masjidnya adalah seorang yang pernah belajar di pondok pesantren, sehingga pengetahuan agama yang dimilikinya tidak diragukan. Selain itu, tokoh-tokoh ini juga memiliki status sosial yang tinggi di hadapan masyarakat. Pekerjaannya sebagai pegawai pemerintah dan pendakwah agama menjadikan status sosialnya lebih unggul dalam pandangan masyarakat desa Klepu. Karena itu, mereka sangat disegani. Perilaku dan ucapannya dijadikan panutan bagi masyarakat. Tak mengherankan jika ide pembentukan forum masjid yang digagasnya sebelum diangkat sebagai ketua forum direspon dengan cepat oleh tokoh-tokoh yang lain. Temuan ini sejalan dengan Korten (1984) yang menyatakan bahwa faktor pengetahuan dan status sosial dari pendamping pemberdayaan masyarakat sangat berpengaruh pada keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.

Selain SDM yang memadai, faktor kemitraan juga berpengaruh terhadap keberhasilan program pemberdayaan

ekonomi masyarakat di desa Klepu. Keberlanjutan program santunan kepada orang-orang lemah tidak terlepas dengan adanya kemitraan yang dilakukan oleh forum masjid dengan pondok pesantren Gontor Darussalam. Pemberian bantuan beras yang dilakukan oleh pondok pesantren Gontor Darussalam secara rutin kepada forum masjid dapat digunakan untuk menambah perolehan dana yang dikumpulkan sendiri. Hal ini tentu dapat menambah atau meningkatkan jumlah penerima manfaatnya, sehingga forum masjid mempunyai kekuatan yang berimbang dengan jamaah nasrani yang didukung oleh gereja pada program peduli kasih. Dengan kekuatan yang berimbang ini tentu upaya untuk saling berebut jamaah (misionaris dengan pendekatan ekonomi) dapat dihindarkan oleh kedua pihak (Latief, 2012). Secara teori, manfaat dari program pemberdayaan yang menyangkut kemanusiaan tidak boleh dinikmati oleh golongan tertentu saja, apalagi dengan membeda-bedakan agama. Namun pada kasus ini berbeda. Kecurigaan satu golongan terhadap golongan lain menjadikan manfaat program pemberdayaan masyarakat ini hanya dapat dinikmati oleh golongan tertentu. Hal ini bertujuan untuk menjaga kedamaian dan keamanan bersama. Karena itu, jika kondisinya seperti ini, maka dibolehkan hasil pemberdayaan masyarakat dinikmati oleh golongan tertentu atau hasil pemberdayaan masyarakat tidak dibagi rata kepada semua orang (United Nations, 1992).

Dengan melihat diskresi dalam menikmati hasil pemberdayaan masyarakat ini, maka kasus informan 16 yang

meminta bantuan kambing dengan ditanggihkan waktunya menjadi hal yang dibenarkan. Pasalnya, forum masjid berhati-hati dan menjaga diri agar tidak muncul fitnah karena peminta bantuan tersebut baru saja berpindah agama. Meskipun sesungguhnya dalam syariat Islam, orang yang baru masuk Islam (muallaf) berhak mendapatkan perlakuan khusus (Sungit, dkk, 2016). Namun pada kasus ini tampaknya berbeda. Saling menghargai dan menghormati untuk menghindari kecurigaan antar pemeluk agama perlu diutamakan. Bukankah kaidah fiqih juga mengajarkan bahwa menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mengambil manfaat (Amin, 2006). Kejadian ini menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan forum masjid untuk menunda pemberian bantuan kepada muallaf merupakan tindakan cerdas dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Hal ini semakin menguatkan temuan bahwa forum masjid desa Klepu selain menguasai seluk beluk tentang pemberdayaan masyarakat, juga menguasai tentang ilmu agama.

H. Kesimpulan

Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang digagas oleh forum masjid di desa Klepu mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasalnya, tiga program yang ditetapkan sebagai program unggulan dapat dirasakan manfaatnya oleh kelompok sasaran, terutama dalam mengatasi persoalan ekonomi dan maraknya konversi agama. Keberhasilan program yang dijalankan oleh forum masjid ini dipengaruhi oleh dua faktor.

Pertama adalah proses dan tahapan pemberdayaannya dilakukan secara sistematis, yaitu mulai dari membangun kesadaran, capacity building, dan pemberian daya. Hal ini sejalan dengan teori pemberdayaan yang dirumuskan oleh Wrihatnolo & Dwidjowijoto (2007). Namun tidak hanya itu, masih ada satu proses dan tahapan lagi yang dijalankan oleh forum masjid, yaitu membangun kemitraan. Kemitraan yang dibangun forum masjid dengan pondok pesantren Gontor Darussalam ternyata memberikan sumbangan yang signifikan dalam mencapai keberhasilan. Kedua, forum masjid memiliki SDM yang berpengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat dan pengetahuan agama. Kemampuan itu tampak dari beberapa SDM yang memiliki latar belakang profesi sebagai penyuluh agama fungsional dan pendakwah agama. SDM seperti itu tentu memiliki banyak pengalaman dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat.

MOSQUE FORUM AND COMMUNITY WELFARE: Analysis of Community Economic Empowerment in Klepu Village in Indonesia

A. Introduction

A mosque is a holy place for Muslims to worship, get closer to God, solve political and social problems, educate and inculcate character, as well as build the community economy (Asif et al, 2021). These functions have been exemplified by the Prophet by building a mosque as the first step in creating a prosperous society (Isnaini, et al, 2019). This shows the mosque is a place to build a prosperous society both physically and spiritually (Sofii & Pertiwi, 2021). Therefore, the managers should realize that mosque as the center of civilization has a very significant role in improving community spirituality, developing social activities, creating intellectual abilities, building discussion for problem-solving, and improving the community economy. All of these are sacred activities with a value of worship.

In practice, only a few mosques carry out the role exemplified by the Prophet (Omar, et al, 2019). Most managers still use the mosque as a place to get closer to God (*mahdhoh*

worship) and for intellectual development in the form of recitations. Meanwhile, its use as a place to solve social and political problems as well as build community economic development or improvement is still not visible (Hady, 2010). The mosque roles as exemplified by the Prophet are still like snow on a mountain that is not visible until it is carefully explored. Therefore, it is interesting to examine the relationship between mosques and community welfare, especially in areas with poor populations. The assumption is that almost every village in Indonesia or hamlets with smaller administrative areas has a mosque. When every mosque carries out its function and role as exemplified by the Prophet, then the problem of poverty can be resolved.

This research examined and analyzed the involvement of a mosque forum in Klepu Village, Sooko Sub-district, Ponorogo Regency, East Java Province in building community welfare. Klepu is one of the poorest villages in the Ponorogo regency, hence many people change religions because they are given economic assistance by followers of other faith (Halwan, 2019). Furthermore, this research focused on the process and results of community empowerment carried out by mosque forum, especially in stemming cases of religious conversion. This is interesting because there is no research related to this matter in the literature.

Several research focused on optimizing mosque-based community empowerment (Ridwanullah and Herdiana, 2018). The results found that the At-Taqwa Mosque in Cirebon has

carried out its roles in community empowerment in the fields of religious spirituality, education, economy, social society, as well as the development of arts and culture. Fahmi (2018) examined the efforts to increase the role of mosques in economic empowerment. It was explained that the mosque builds cooperatives and provides capital loans to small entrepreneurs as a strategy for empowerment. Also, Khairunnisa and Siregar (2022) investigated the role of mosque in the development of micro, small and medium enterprises (MSME). The results showed the mosque provided business facilities for the surrounding MSME actors without being charged a rental fee. However, previous research was only limited to the role of mosque in providing facilities, both capital and locations to MSME actors to develop their businesses. The real roles of empowerment which include awareness creation, skill improvement, and empowering the community to create job opportunities have not been explored. Furthermore, research is still focused on one mosque managed by an independently formed board. Meanwhile, research on combined mosques, especially those with different schools of thought with joint management has not been found. Therefore, this research is feasible.

B. Literature Review

Research on mosques as objects of study has been widely conducted, especially those related to history and architecture. However, research on mosques as a subject of study, especially

in relation to solving social, political, and economic problems, is still very limited. The mosque as the object of research is understood as a building, while as the subject, it is understood by the management. The mosque as a subject in community empowerment was examined by Khairunnisa & Siregar (2022) and Rusanti, et al (2021). The results found that the Al-Falaah Grand Mosque provided an outlet, water, and electricity facilities for MSME actors with 60% profit sharing for business actors and 40% donated to the mosque. Meanwhile, Rusanti, et al (2021) explained that the mosque which was used as the object of their research provided a place of business for MSME actors. A place of business was provided on the ground floor where MSME actors were not charged a rental fee and can peddle their wares every Friday from 09.00 - 15.00. Also, a business place was provided in the yard or parking lot. In this place, MSME actors were charged a rental fee between IDR 500,000 - IDR 700,000 per year and can open their business every day. These two research show the role of mosques in empowering the community economy through the provision of business premises for MSME actors.

Soemitra (2014), Susanto (2020), and Sofii & Pertiwi (2021) examined economic empowerment by providing business capital. Soemitra (2014) explained that empowerment at the Al-Jihad mosque was carried out by building *Bait al-Maal wa at-Tamwil* (BMT) to assist and facilitate MSME actors in accessing capital. The establishment of this BMT is considered important because many MSME actors are in debt to moneylenders.

The funds for the BMT management come from the basic and mandatory contributions of participants as well as the collection of *zakat*, *infaq*, and *shodaqoh*. In contrast, Susanto (2020) explained that the Sabilillah Mosque empowers the community's economy by establishing cooperatives and the Amil Zakat Institution (LAZ). These cooperatives are used to help SMEs with a savings and loan system, while LAZ is used to help build and develop businesses for the poor through grants. Meanwhile, Sofii & Pertiwi (2021) stated that the Jami As-Sakinah Mosque empowers the community's economy by providing capital loans to MSME actors in which funding is collected from *zakat*, *infaq*, and *shodaqoh*. However, the business capital loans provided by these mosques are not accompanied by assistance in managing businesses, hence some actors experience failures.

Muslim, et al (2014) investigated community empowerment through partnerships with other parties. The result found that the Jogokaryan mosque collaborated with BMT Bina Ikhshanul Fikri to help congregations access business capital. Cooperation with financial institutions is seen as important because many poor people cannot access capital due to a lack of collateral (receivable guarantees). In this case, the mosque acts as a guarantor for individuals who want to borrow money from these financial institutions. Therefore, the mosque always monitors customers continuously. The same analysis was conducted by Said & Mahmuddin (2015) in Palangka Raya, Central Kalimantan, and found that the mosque cooperates with

Bank Muamalah Indonesia (BMI) to develop the community's economy. The mosque that wishes to cooperate with BMI should have a BMT, through which money is disbursed to the congregations. Therefore, the status of the congregations is borrowing capital from BMT, which in turn borrows from BMI.

Based on the above discussion, this research on mosque forum and community welfare is still feasible to be conducted, especially in the process of economic empowerment. The process includes steps taken to ensure the effectiveness and efficiency of empowerment to produce maximum results (Muslim, et al, 2014). According to Wrihatnolo & Dwidjowijoto (2007), the process of community empowerment includes three stages, namely creating awareness, capacity building, and providing power. Creating public awareness is an initial process that should be completed before other processes are carried out. This stage determines whether the next empowerment process can be carried out or even stopped. Also, without the awareness of the beneficiaries, the empowerment program will not succeed (Muslim, et al, 2014).

The next step is capacity building where the beneficiaries are trained in business skills to be innovative, hence they become competitive with other entrepreneurs. The skills training provided can be in the form of courses, field visits to places of successful business, and others. The purpose of capacity building is to equip beneficiaries with the necessary skills to independently and sustainably manage their businesses (Theresia, 2015).

The final step is providing power after the beneficiaries already have skills and are ready to start a business. Power can be in the form of business capital and trust. The provision of capital in the form of grants or loans to build a new business or develop an existing one is a form of empowerment or strengthening. This is because starting a business needs skills and capital. Moreover, this aims to make beneficiaries run their business independently, and community empowerment should not create new dependencies (Ife, 2016).

The main principle in economic empowerment to avoid dependence is to work with the community (Nyerere, 1978). This principle implies that empowerment actors (mosque forum) should work collaboratively with the community, ranging from exploring problems to enjoying the results. In other words, a mosque forum is not allowed to design its programs without involving the community. Moreover, to avoid dependence, the forum should be able to build an atmosphere that allows beneficiaries to develop. For example, innovative programs should be supported by the availability of local resources.

C. Research Method

This research was conducted with an ethnographic approach at Klepu Village, Sooko, Ponorogo, East Java, Indonesia. This is a poor village with less fertile land, hence creativity is needed to empower the economy and improve community welfare. Secondly, the community often changes

their religion to those embraced by the aid providers because of economic demands. Thirdly, the mosque forum which is a facilitator in economic empowerment has various sects or beliefs.

The main informants were people in the mosque forum organization, the local community, and village government officials. The supporting informants were religious administrators outside the mosque forum in the local village and sub-district. The inclusion criteria for the main informants include having a role as the initiators of forming the mosque forum, being active in community empowerment, and being government officials who control empowerment activities. Meanwhile, the criteria for the supporting informants were people from religious institutions outside the mosque forum who were actively involved in community empowerment activities.

The sample size for the main and supporting informants was determined based on the saturation of the information obtained. This means that when there is no new information obtained from new informants, then the sampling for main and supporting informants is terminated. Based on these criteria, the number of samples obtained was 21 people consisting of 16 main informants and 5 supporting.

The data were collected using interviews and observation, which were subsequently noted, recorded, and validated. The data validity was performed by triangulation, where the data obtained from interviews were checked and compared.

Furthermore, the valid data were analyzed using the interactive technique of Miles & Huberman (1984). This stage started with data reduction that was carried out in two stages, namely when in the field using triangulation as described above, and at home by sorting and selecting data that needed to be further analyzed. Also, the sorted and selected data were presented and analyzed for the relationship with the problem to be solved. The conclusion was drawn by comparing data related to the main problem with the relevant previous research.

D. Overview of the Mosque Forum

The mosque forum in Klepu, Sooko, Ponorogo was established in 2008. At its inception, it consisted of 17 mosques, all of which were located in the Klepu village area. Over time, its membership increased by one due to new construction. The establishment of this forum was due to the activities of Munawar who tried to carry out religious purification in the village concerning worship. Munawar viewed that the acts of worship carried out by Muslims have deviated from the teachings of Islam taught by the Prophet Muhammad. The beliefs of Muslims in Klepu had been mixed with local culture, hence they were heavily involved in acts of heresy, *kurafat*, and superstition. Munawar was a Muslim affiliated with the Indonesian Islamic Da'wah Council (DDII) religious organization (Lutfi, 2019). Besides DDII, other Islamic religious organizations in Klepu village were Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, and Tablighi Jamaat (JT). Munawar's actions hurt other

Muslims, especially those affiliated with the NU organization. Moreover, NU followers were the majority of followers in this village (Interviews with informants 02, 03, and 04).

Munawar also voiced the issue of Christians who distributed aid to the poor. It was viewed that the assistance provided by the church to the poor is a serious threat to the existence of Muslims. Therefore, Munawar wanted these actions to be contained. This elicited a reaction from the church, which had a larger number of followers than Islam. As long as this is allowed to continue, there will be friction between Muslims and Christians. Nevertheless, the church viewed the distribution of aid to the poor as a routine program to show “love” to others, and not a Christianization scheme as alleged by Munawar (Interviews with informants 20 and 02).

The actions of Munawar eventually became a crisis both among Muslims and Christians. NU as the oldest Islamic organization in Klepu village felt insulted by newcomers who have heretical worship activities (Interviews with informants 02 and 03). Also, churches with many people occupying strategic positions in the village administrations felt uncomfortable because the space for worship was considered a threat to the existence of other religions (Interviews with informants 20 and 21). When this crisis escalated, Mustakim, a Muslim from Muhammadiyah circles asked to meet the management of the mosque to solve the problems (Interviews with informants 02 and 03). The DDII leaders welcomed Mustakim’s invitation because they disagreed with Munawar’s actions (Interviews

with informants 03 and 08). The same response was shown by NU and JT circles (Interviews with informants 09 and 10). Then a mosque forum was formed at the village level which was used as an official communication platform between mosques and churches.

Several important factors became an agreement in this forum. Firstly, it was founded on common interests and stands above all groups. Therefore, this forum should not discuss or enforce the truth of existing sects, such as DDII, Muhammadiyah, NU, and JT. In other words, the issue of differences that are recognized as true by each group should not be discussed. Secondly, it was mutual respect and tolerance, both with fellow Muslims and other people. Thirdly, it should avoid distributing aid to followers of other religions to prevent missionary issues. Lastly, it built the economy of the congregations, hence it is not easy to disturb their religion (Interviews with informants 02, 03, 04, 08, 09, and 10).

E. Community Economic Empowerment Process

The mosque forum conducts community empowerment through three programs, namely the assistance provision of goats, compensation for the weak, and building entrepreneurship (Interviews with informants 02, 04, and 07). The assistance of goats is given to poor Muslim families. This means that poor non-muslims will not be given this assistance, which aims to avoid any suspicion of missionaries (Interview with informant 04). The selection of people who are entitled to receive

assistance is conducted by the administrators of each mosque who are members of the forum. This is intended to avoid mistargeting and also to facilitate monitoring and evaluation (Interview with informant 05). The program was selected by the mosque forum because Klepu village is located on the slopes of the mountains which makes it suitable for raising animals, especially goats. The abundance of grass around the house and farming as the main livelihood made this program appropriate (Observation on March 5, 2022). This is in line with the theory that empowerment should pay attention to the potentials of the target community (Soedarto, et al, 2016).

The funds for the provision of goats are obtained from the contributions of each member mosque of the forum. The amount is determined at IDR 200,000,- every month. Fundraising is carried out at meetings and at the same time as regular recitations whose places are set in rotation. The funds collected in one year of about IDR 40,800,000 are then used to buy goats. This amount can be used to buy as many as 16 goats with an average price of IDR 2,500,000 each. The distribution system of assistance is offered to each mosque that is ready to receive. Then the mosque distributes the assistance to its congregations who are economically poor. Each poor congregation will receive a pair of goats. Therefore, the number of beneficiaries of this program is 8 families each year (Interview with informant 04).

The monitoring system for beneficiaries is carried out by each mosque to ensure that the assistance is used according

to its purpose. This helps to monitor the progress and success of the program. Meanwhile, a comprehensive evaluation is conducted by the mosque forum through reports on the condition, progress, and success of the assistance provided before the next distribution (Interviews with informants 04 and 05). Through a strict monitoring and evaluation system, this program runs well as evidenced by its continued existence until 2019. From 2020 to early 2022, this program was stopped because mosques were closed due to the impact of the COVID-19 pandemic. Due to the closure, there was no input for the mosque, hence it was unable to pay the monthly fee (Interviews with informants 02, 04, and 05).

Besides assistance provision for goats, another program is compensation for the weak. According to the category of this forum, the weak are poor elderly people, widows, and orphans (Interviews with informants 02 and 04). They are given compensation, where the funds are obtained through *infaq* and *shodaqoh* from participants who attend the forum's regular meetings. During the monthly meeting, each mosque sends at least two representatives. Those present are offered *infaq* or *shodaqoh* to help alleviate the needs of the weak by being presented with boxes rotated among fellow participants (Interview with informant 04). The collected funds are not directly distributed to those who are entitled to receive them but are compounded to a feasible amount to be properly distributed. Besides raising funds internally, the forum also opens space for outsiders to participate in this program.

External parties who support and routinely provide assistance for this program are the Gontor Darussalam Islamic Boarding School with thousands of students. Almost every month, this school sends assistance between 1-3 quintals of rice to be distributed (Interviews with informants 02, 04, and 17).

The steps of distributing this assistance are the same as when giving goats. All the money collected is realized or spent in the form of basic necessities, such as rice, cooking oil, and sugar. Each beneficiary will receive the assistance of approximately IDR 150.000,-. After knowing the amount of the goods, the forum offers to each mosque for its distribution (Interviews with informants 04, 06, and 15). When there is a problem or conflict that cannot be resolved in the distribution, the forum agrees to submit the solution to Sukarsi as an advisor to make an absolute decision that would be agreed upon by everyone (Interviews with informants 06, 07, and 01).

Also, the economic empowerment program aims to build women's entrepreneurship. The type of business developed is in the form of processed food and handicrafts. This activity is coordinated by the chairman of Khoirun Nisa. The Khoirun Nisa is a non-formal educational institution established by a mosque forum to improve the quality of women's knowledge in Klepu village (Interview with informant 07). The empowerment process begins by identifying the potential interests and skills possessed by the women as members. The interests and skills identified are limited to two (2) types of businesses being developed, namely processed food and handicrafts. In the

next process, the chairman of Khoirun Nisa looked for skilled experts according to the desired needs to train these women. After the process is completed, they are allowed to implement the results of the training. The products of those who do not have their market are marketed by the management of Khoirun Nisa (Interviews with informants 07, 12, and 14).

The marketing system is run by Khoirun Nisa in collaboration with the Coni mini market, managed by the Gontor Darussalam Islamic Boarding School. In the process, the management of Khoirun Nisa buys products made by members in cash with an agreement that unsold goods will be returned to their owners. This means that the management buys every product made by its members in cash, then it is packaged with the Khoirun Nisa Brand. After that, it is sent and marketed to the Coni mini market. However, when the goods are not sold and expired within a certain time limit, then they are returned to the owner to be replaced with new ones (Interviews with informants 07, 12, 13, 14, and 18).

Khoirun Nisa obtains funds to increase skills and capital to purchase products from women through a grant from the local ministry of religion. Also, fund proposal is carried out for women's economic empowerment. The Ministry of Religion approved and provided assistance of IDR 7,000,000,- (seven million rupiahs) (Interview with informants 07 and 19). This is running smoothly, and many women have benefited from the program. They feel that their products, especially processed foods, are sold more than returned. According to their

estimation, the product is suitable for snacks for the students and the price is also not expensive (Interviews with informants 12, 13, and 14). However, since the end of 2019, this program has not run smoothly as a result of the COVID-19 outbreak. Due to the lockdown and restrictions on interaction with the outside world, Khoirun Nisa's management cannot send their products to the Coni mini market. Transactions at the Coni mini market are also minimal (Interviews with informants 07 and 18).

F. Results of Community Economic Empowerment

The economic empowerment carried out by the forum is felt by Muslims in the village. They feel helped by giving goats and entrepreneurship assistance as expressed by informant 11:

I received the assistance of male and female goats in 2012 from the mosque forum. The goat has given birth many times. This goat and the four that are still in the stable are the only offspring. I only have five goats now. Because the mother is old, I sold it to meet the needs of the children's school and primary needs. Furthermore, if the numbers are many, it is burdensome to find food. With the presence of a mosque forum in this village, I feel helped, especially now the forum provides business assistance for women. My wife has been participating in this activity since 2015. The results were quite satisfying before the Covid-19 outbreak, which can cover the primary needs.Can you see for yourself, how people like me who work as laborers can live only by relying on income from harvesting rice fields with land conditions like this? Certainly, it is not enough for primary needs, especially for children's school (Interview and Observation of informants 11).

The statement of informant 11 above shows that economic empowerment can overcome the problem of basic needs in the community, especially the need for food and education. Furthermore, this empowerment is also able to stem the problem of religious conversion which is often carried out by the community due to the pressure of economic needs. Also, it can stimulate people who have changed religions to return to their original faith. This is as expressed by informant 16 as follows:

I once asked for assistance in the form of a goat, but it was rejected because I am not a Muslim. Yes, I've changed religion. I was forced to change religions, to follow people who help make ends meet.Because I hope to get the assistance of a goat, then I returned to being a Muslim. However, after I re-converted to Islam, the assistance I hoped for was not immediately given. The wait was quite long, I was asked to be patient and wait.

Statement from informant 16 was confirmed by informant 03 as a member of the mosque forum as stated below:

Because of the demands of life, changing religion is not a new problem. It happens often. Therefore, the task of the mosque forum is to stem it from happening by strengthening the congregation both economically and in faith. Moreover, an inter-religious agreement was made not to assist in the name of religion to the community.Well, the reason for not giving goat aid to converts is because of this agreement.

Based on the above statements, the empowerment carried out by the forum can help improve community welfare. The achievement of economic welfare has an impact on tranquility,

hence cases of religious conversion can be minimized. The expression that poverty is close to *kufur* (Al-Ishfahani, 1982: 53) or poverty can make a person weak in faith is true by looking at the case in Klepu. Therefore, economic empowerment to improve the welfare of the poor needs to be sustained by religious leaders to protect and maintain the faith of their followers.

G. Discussion

The success of the mosque forum in building community welfare cannot be separated from the awareness of religious leaders to solve the problems of missionary and religious purification. Without proper handling, both vital issues can become a disaster. Even though, missionary and purification are religious issues, they cannot be separated from the issue of poverty. Missionaries often carry out their activities in areas with high poverty rates, such as in Klepu village. With the lure of wealth, missionaries, both Muslims and Christians, persuade people of different religions to convert (Latief, 2012). These activities can have a fatal impact and harm all parties. Therefore, the efforts made by the mosque forum to strengthen the defense of each person's religion through inter and intrafaith agreements and to empower the community's economy are noble and dignified.

The activities carried out by the forum are in line with the empowerment theory. According to Wrihatnolo & Dwidjowijoto (2007), community empowerment is carried out through three

stages, namely creating awareness, capacity building, and providing power. The stages of each process carried out by the mosque forum in Klepu village are clear. For example, in creating awareness, the forum in which the members consist of representatives of each mosque in the village discusses their potentials to know which are suitable for development. The assistance in the form of goat farming was selected based on assessment and agreement that the potential was very possible to be developed. This is because most of the residents work as farmers with mountainous slopes overgrown with grass. Likewise, the establishment of a women's entrepreneurship program that only uses food processing and handicraft business because the marketing potential is already available, namely the Coni mini market. Explaining the potential helps the forum to build awareness among the beneficiaries. Furthermore, the stage of building capacity was carried out by employing experts to train people who need skills in a specific field. This is seen in the empowerment in the field of entrepreneurship. Meanwhile, the goat farming program is not visible, because the recipients are farmers with assumptions that they already have the skills to cultivate animals. Finally, the empowerment stage was carried out by giving free goats and helping with product marketing. The orderliness of the stages shows the forum professionally conducted its activities.

Professionalism is successfully achieved because the forum has adequate human resources. The head of Khoirun Nisa, for example, is a functional religious instructor with

many achievements in community empowerment and works under the Ministry of Religion of Ponorogo Regency. Also, the chairman of the forum studied at an Islamic boarding school and has good religious knowledge. Moreover, these individuals have a high social status in the community. Their work as government employees and religious preachers made their social status superior in the community and highly respected. Their behavior and words are used as role models in society. It is not surprising that other figures quickly responded to the idea of forming a forum. This is in line with Korten (1984) that the knowledge and social status of community empowerment facilitators greatly influence the success of the programs.

Besides adequate human resources, the partnership factor also affects the success of the empowerment program. The sustainability of the compensation program for the weak cannot be separated from the partnership carried out by the forum with the Gontor Darussalam Islamic boarding school. The rice assistance can be used to increase the acquisition of funds collected. This can increase the number of beneficiaries, hence the forum has a balanced power with Christian congregations supported by the church in the care program. With this balanced power, efforts to fight for congregations (missionaries with an economic approach) can be avoided by both parties (Latief, 2012). In theory, the benefits of empowerment programs involving humanity should not be enjoyed only by certain groups. Intergroup suspicion makes the benefits of this empowerment program to be enjoyed by certain groups.

Therefore, such conditions cause the results of empowerment to be enjoyed by certain groups or are not shared equally among everyone (United Nations, 1992).

By considering the discretion in enjoying the results of this program, the case of informant 16 asking for goat assistance with a delay is justified. The reason is that the forum is careful and keeps itself from appearing slanderous because the requester has just changed religion. Moreover, Islamic law states that people who just converted are entitled to special treatment (Sungit, et al, 2016), but it is different in this case. Mutual respect also needs to be a priority in order to avoid suspicion between religious adherents. *Fiqh* rules teach that rejecting damage should take precedence over taking benefits (Amin, 2006). This incident shows that the actions of the forum in delaying assistance to converts are smart and do not conflict with religious teachings. This further strengthens the finding that the Klepu village mosque forum not only controls the ins and outs of community empowerment but also masters religious knowledge.

H. Conclusion

The empowerment initiated by the mosque forum can improve community welfare. The three programs designated as superior can be felt by the target group, especially in overcoming economic problems and the increase in religious conversion. The success of the program is influenced by two factors. Firstly, the process and stages of empowerment are

carried out systematically, starting from creating awareness, capacity building, and providing power. This is in line with the empowerment theory by Wrihatnolo & Dwidjowijoto (2007). Furthermore, there is still one more process carried out by the forum, namely building partnerships. The partnership with the Gontor Darussalam Islamic boarding school has a significant contribution to achieving success. Secondly, the forum has experienced human resources in the field of community empowerment and religious knowledge. This ability can be seen in several human resources who have professional backgrounds as functional religious instructors and preachers with a lot of experience in solving problems in society.

Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ketua, sekretaris, dan anggota senat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah meloloskan usulan kenaikan pangkat ke guru besar dan telah mewisuda saya sebagai guru besar melalui sidang senat terbuka pada hari ini.
2. Rektor dan jajarannya yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk mengikuti program-program peningkatan kualitas mutu penulisan karya ilmiah.
3. Pengelola LPPM UIN Sunan Kalijaga yang telah membantu saya dalam pendanaan penelitian sejak tahun 2016 s/d 2023 yang tidak pernah putus.

4. Orang-orang yang paling berjasa di saat saya sudah putus asa dalam mengurus pangkat guru besar ini, yaitu:
 - a. Bapak Khoirul Anwar, S.Ag. M. A kepala bagian Akademik Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama.
 - b. Mbak Heni Hapsari staff bagian Akademik Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama.
 - c. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., MA., M.Phil., Ph.D dan Bapak Prof. Dr. Iswandi Syahputra, S.Ag., M.Si.
 - d. Mas Ahmad Izudin, M.Si., Mas Rahadiyand Aditya, MA., dan Mas Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos., M.Si sebagai pengelola Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan.
5. Teman-teman diskusi dosen Pascasarjana dan dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
6. Orang tua saya: Ibu Ponirah dan Almarhum Bapak Mariman, Istri saya: Titik Helmi Khoiriyah, S.Ag., Anak-anak saya: Muhammad Khoirul Muslimin, S.T., M.Eng., dan Nur al-Azizah al-Hilmiyah, S.Pd. Adik-adik saya: Ali Mashud dan Ahmad Taptazani beserta anak dan istrinya, serta kakak-kakak dan adik-adik ipar saya beserta anak dan istrinya.

Daftar Pustaka

Al-Ishfahâni, A. N. A. 1982. *Hilyah al-Auliya'*, vol. 3, Beirut: Dar al-kitab al-Arabi.

- Amin, S. M. 2006. Qoidah: Dar'û al-Mafasid Aula min Jalbi al-Masholih. Al-Jamiat Al-Ifriqiat: Al-Aqid Ahmad Diraya. <https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/bitstream/123456789/636/1/20%مؤمين%20محمد%20سهيل%20المفاسد%20درء%20قاعدة.pdf>.
- Asif, N., Utaberta, N., Ismail, S., and Shaharil, M.I. 2021. The Study on the Functional Aspects of Mosque Institution. *Journal of Islamic Architecture*. 6 (4), 229-236. <http://dx.doi.org/10.18860/jia.v6i4.11749>
- Fahmi, R. A. 2018. Enhancing the Economic Role of the Mosque Through Empowerment: A Case Study in Yogyakarta City. *Jurnal Ekonomi Manajemen & Bisnis*, 19 (1), 57-70.
- Hady, Z.M.A. 2010. The Masjid, Yesterday and Today. Georgetown University: Center for International and Regional Studies. <https://www.files.ethz.ch/isn/122833/AbdelHadyBriefCompleteFile.pdf>.
- Halwan, M. (2019). *Klepu, Desa Terpencil di Ponorogo 40 Tahun Lebih Dikuasai Sabilis*. <http://muallafdunia.blogspot.com/2019/01/klepu-desa-terpencil-di-ponorogo-40.html>.
- Ife, J. (2016). *Community Development in an Uncertain World: Vision, Analysis and Practice*. Cambridge University Press.
- Isnaini, U.K.N., Nyimasmukti, B.R., Rahawarin, Y., Asrida. (2019). Revitalizing the Mosques Function as a Means of Forming Muslim Scholars and Students in Indonesia. *Khalifa Journal of Islamic Education*, 3 (2), 142-153.

- Khairunnisa dan Siregar, S.A. 2022. The Role of Mosques in MSME Development in Medan City. *Proceeding International Seminar on Islamic Studies*. 3 (1), 63-67.
- Korten, D.C. 1984. *People Centered Development*. West Harford: Kumarian Press.
- Latief, H. 2012. Islamic Charities and Dakwah Movements in A Muslim Minority Island: the Experience of Niasan Muslims. *Journal of Indonesian Islam*. 6 (2), 221-244.
- Lutfi, A. 2019. The Practices of Religious Truth Contestation Analysis of Muslim Community Before Catholics in Ponorogo. *Jurnal Masyarakat & Budaya*. 21 (1), 17-30.
- Miles, H. B., & Huberman, A. M. (1984). *Qualitative Data Analyse: a Source Book of New Methods*. Beverly Hill: Sage Publication.
- Muslim, A., Karsidi R., Wijaya, M., & Joebagio H. (2014). A Mosque-Based Economic Empowerment Model for Urban Poor Community. *International Journal of Social Science Research*, 2 (2), 80-93. <https://doi.org/10.5296/ijssr.v2i2.5472>.
- Nyerere, J.K. (1978). *Development is for Man, by Man, and of Man: The Declaration of Dar es Salaam, in Adult Learning A Design for Action*, editor B.L. Hall and J.R. Kidd. New York: Pergamon Press.
- Omar, N., Muda, Z., Yaakob, R., & Maoti, M. (2019). Mosques as an Agent for Community Development in the History of Islam. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 9 (9), 763–772.

- Ridwanullah, A.I., and Herdiana, D. 2018. Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*. 12 (1), 82-98.
- Rusanti, E., Sofyan, A.S., and Syarifuddin. 2021. Strategic Analysis of a Mosque-Based Community Economic Empowerment Strategy at the Islamic Center Dato Tiro Bulukumba. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*. 11 (1), 41-50.
- Said, M.M., and Mahmuddin. 2015. Mosque-Based Empowerment of the Muamalat Micro Business Community in Indonesia. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*. 9 (31), 464-476.
- Soedarto, T., Sumartono, Zuhri, S., and Rining, E. 2016. Community Empowerment Based on Local Potential. *International Joint Conference on Science and Technology*. 1, 1-6.
- Soemitra, A. 2014. People Empowerment Strategies Through the Mosques: Case Study of Masjid Al-Jihad Brayon Medan. *Ibda' Jurnal Kebudayaan Islam*. 12 (1), 1-12.
- Sofii, I., Pertiwi, I. (2021). The Role of The Mosque in Economic Empowerment and Community Welfare Through MSMEs in The South Jakarta Region. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6 (1), 36-52.
- Sungit, F., Shaharuddin, S.A., Usman, A.H., Majid, M.A., Abdullah, M.Y.M. 2016. Discourse of Converts: Definitions and Some Implications in the Contemporary Muslim

- Society. *Ponte: International Scientific Researches Journal*. 72 (9), 423-437.
- Susanto, A.E. (2020). *Strategi Masjid dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Masjid Sabilillah Malang)*. Thesis UIN Sunan Ampel Surabaya. http://digilib.uinsby.ac.id/44378/2/Aki%20Edi%20Susanto_F02418137.pdf.
- Theresia, A. (2015). *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Cambridge Mass: Blackwell Publisher.
- United Nations. 1992. *Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities*. Article 2: 3. General Assembly resolution 47/135
- Wrihatnolo, R.R., & Dwidjowijoto, R.N. (2007). *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

BIODATA

Nama : Prof. Dr. Azis Muslim, M.Pd.
Kelahiran : Banyuwangi, 28 Mei 1970
Alamat : Pakem 04/02 Tamanmartani Kalasan Sleman
DIY
Unit Kerja : Prodi Studi Islam (S3) UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Pendidikan

- ❖ S3, 2014, Penyuluhan Pembangunan/ Pemberdayaan Masyarakat, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- ❖ S2, 2000, Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Universitas Negeri Yogyakarta.
- ❖ S1, 1993, Bimbingan Penyuluhan Agama Islam (BPAI) Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Publikasi

❖ Artikel Jurnal

1. 2023, "From Traditional Trade to E-Commerce (Case Analysis on Empowerment of Conventional Market Traders in Yogyakarta)", dalam *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, Vol. 7, No. 1.
2. 2023, "The Veil: A Phenomenon of Urban Society and Religious Identity", dalam *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, Vol. 8, No. 1.

3. 2023, "Development of Halal Tourism Destinations on Lombok Island in Six Features Perspective of Jasser Auda's Maqasid Syari'ah", dalam *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, Vol. 19 No. 2.
4. 2023, "Study of the Arguments of the Al-Qur'an and Hadith Permissibility of Cash Waqf in Indonesia", dalam *Al-Quds: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 7 No. 2.
5. 2023, "Polemik Peraturan Pengeras Suara Masjid di Indonesia: Perspektif Agama sebagai Bagian Sistem Budaya, dalam *Umbara: Indonesian Journal of Anthropology*, Vol. 8 No. 1.
6. 2023, "Wanita Karir: Analisis QS. Al-Ahzab: 33 Berbasis Teori Double Movement", dalam *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner*, Vol. 8 No. 1.
7. 2022, "Transisi, Eksistensi, dan Spiritualitas Transpria: Pengalaman dan Argumen Amar Alfikar", dalam *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 21 No. 2.
8. 2022, "Islamic Teaching and Learning Model for Autistic Children in Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur'an Ponorogo", dalam *Jurnal Tarbiyatuna*, Vol. 13 No. 1.
9. 2022, "Islam dan Produk Halal: Muslimah, Komodifikasi Agama dan Konsolidasi Identitas Keagamaan di Indonesia", *Profetika: Jurnal Studi Islam*, Vol. 23 No. 1.
10. 2022, "Do Poverty and Human Development Index Influence Happiness? Evidence from Indonesia through Islamic Studies Approach", dalam *el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 10 No. 1.

11. 2022, "Ijarah Collaborative Service Model in Sharia Banking", dalam *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*, Vol. 5 No. 2.
12. 2022, "Revitalization of The Collection of Zakat Funds in Indonesia: An Explanation from Yusuf Al-Qaradawi's Fiqh Al-Zakah", dalam *Journal of Islamic Economics Lariba*, Vol. 8 No. 2.
13. 2021, "Housewives and Virtual Market Shop during the Coronavirus Pandemic: Insight from Women's Empowerment Process", dalam *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, Vol. 5 No. 1.
14. 2021, "Ethnic Stereotyping and Intra-Religious Conflict: The Experience of Muslims in Sambas of the Indonesian West Borneo", dalam *Al-Albab*, Vol. 10 No. 2.
15. 2021, "The Role of Zakat Accounting: Normative and Contextual Approach to Case Study in Indonesia", dalam *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*, Vol. 6 No. 2.
16. 2021, "Feminisme dalam Pesantren: Kajian Kritik Sastra Feminis dalam Novel Dua Barista Karya Najhaty Sharma", dalam *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 7 No. 1.
17. 2021, "Konsep Diri Pada Masa Dewasa Awal Yang Mengalami Maladaptive Daydreaming", dalam *Al-Qalb: Jurnal Psikologi Islam*, Vol. 12 No. 2.
18. 2020, "Islam Nusantara: A Study on The Effect of Local Wisdom Value on Customary Community's Piety in

- Kampung Naga”, dalam *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, Vol. 5 No. 2.
19. 2020, “Building Mosque-Based Food Self-Sufficiency Through Paddy Infaq”, dalam *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Vol. 4 No. 1.
 20. 2018, “Strategy of Managing Sunday Morning Market in Gajah Mada University and its Effect on Seller’s Income”, dalam *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. 34 No. 2.
 21. 2017, “Analisis Kegagalan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Dalam Membangun Kemandirian Masyarakat Miskin”, dalam *Jurnal Penyuluhan*, Vol. 13 No. 1.
 22. 2017, “The Effect of Renewable Energy Source Utilization on the Community Economy in Balong Wetan Umbulharjo Cangkringan Sleman Yogyakarta”, dalam *Journal of Applied Sciences Research*, Vol. 13 No. 4.
 23. 2017, “The Effect of Rubbish Management Socialization Based on Indonesian Ulama Council’s Fatwa Number 47 of 2014 on Community Behavior in Dealing with Rubbish Problem”, dalam *Asian Social Science*, Vol. 13 No. 10.
 24. 2016, “Economic Community Empowerment through Tourist Village Development”, dalam *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. 32 No. 2.
 25. 2016, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Yayasan Perjuangan Wahidiyah”, dalam *Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 10 No. 2.

26. 2015, "A Model of Job Opportunity Creation Through Basic Skill Empowerment for Housewives", dalam *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, Vol. 7 No. 2.
27. 2015, "A Model of Shodaqoh-Based Waste Management", dalam *Environmental Management and Sustainable Development*, Vol. 4 No. 1.
28. 2014, "A Mosque-Based Economic Empowerment Model for Urban Poor Community", dalam *International Journal of Social Science Research*, Vol. 2 No. 2.

❖ **Buku**

1. 2008, *Metodologi Pengembangan Masyarakat*, Yogyakarta: Bidang Akademik, UIN Sunan Kalijaga.
2. 2012. *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*, Yogyakarta: Samudra Biru.

❖ **Bab dalam buku**

1. 2019, Efektivitas Praktikum Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (Prodi PMI) dalam Mengatasi Masalah di Masyarakat", dalam *Indonesia Berdaya: Kiprah Prodi Pengembangan Masyarakat Islam dalam Menyelesaikan Persoalan Bangsa*, Ahmad Izudin (ed.), Yogyakarta: Samudra Biru.

Mata Kuliah Yang Diampu

1. Studi Islam: Teks, Konteks, dan Metodologi (S3)
2. Islam dan Teori-teori Sosial (S3)
3. Nalar Humanitarian dan Pembangunan Berkelanjutan (S3)
4. Islam: Teks dan Konteks (S2)
5. Agama dan Teori-teori Sosial (S2)
6. Pemberdayaan Masyarakat Inklusif (S2)
7. Metode Penelitian Kualitatif (S1)
8. Pengantar Pengembangan Masyarakat (S1)
9. Fiqh-Ushul Fiqh (S1)

Penghargaan

1. Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya 20 Tahun
2. Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya 10 Tahun

